

## Mewujudkan Kepublikan Pemilu Dikalangan Pemuda dengan Mendorong Pemilih Muda sebagai Subjek Politik

Ali Asfar<sup>1</sup>, Zuchruf Firdaus<sup>2</sup>, David Kasidi<sup>3</sup>, Siska Yustika<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau

<sup>2</sup> STIE Indonesia Malang

<sup>3</sup> Stisospol Waskita Dharma Malang

<sup>4</sup> STIE Indonesia Malang

Email: [aliasfar@unilak.ac.id](mailto:aliasfar@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [fzuchruf@yahoo.co.id](mailto:fzuchruf@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [dvdkasidi77@gmail.com](mailto:dvdkasidi77@gmail.com)<sup>3</sup>, [siskayustika0304@gmail.com](mailto:siskayustika0304@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Pemilu tahun 2024 memperlihatkan adanya pergeseran demografi pemilih, dimana pemilih yang termasuk dalam kategori pemilih muda secara kuantitatif mencapai 56,45% dari seluruh DPT yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka tersebut memunculkan keprihatinan karena pemuda cenderung didefinisikan sebagai symbol partisipatif daripada sebagai agen perubahan yang perlu didorong sebagai subjek politik. Survei Centre for Strategic and International Studies (2022) menunjukkan sekitar 59% pemuda mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi pemilu, meskipun media social sering gagal menyajikan informasi yang valid mengenai rekam jejak kandidat (Fernandes et al., 2023). Namun, media sosial KPU yang seharusnya menjadi sumber valid, perannya cenderung pada publikasi liputan harian dan informasi yang lebih bersifat teknis dalam pemilu. KPU sebagai lembaga publik yang independen perlu menjadi lebih publik dengan publikasi informasi lebih substansial daripada informasi yang cenderung birokratis. Oleh karena itu, KPU perlu mengubah paradigma dan memperlakukan pemuda sebagai subjek politik yang dapat berpikir kritis, salah satu caranya adalah secara terbuka memberikan informasi profil dan rekam jejak para peserta pemilu dan mendorong peserta pemilu serius mempublikasikan perhatiannya terhadap isu-isu yang menjadi persoalan publik. KPU juga perlu mempertimbangkan segmentasi pemilih di kalangan generasi pemuda, seperti segmen pemilih muda rasional, pemilih muda yang menyukai politik ringan dan sederhana dengan berselancar di media sosial, dan pemilih muda yang terafiliasi secara ideologis dengan organisasi kepemudaan, khususnya dalam mendesain konten publikasi yang akan menjadi public space dan public sphere anak muda dalam mengadopsi informasi yang valid, sekaligus mendorong generasi muda terlibat sebagai Smart Digital Activism. Lanskap pemilu Tahun 2024 perlu dipandang secara serius seperti dalam penelitian Dettman & Pepinsky (2022), menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara demografi dan perilaku memilih pada pemilu, termasuk cara pemilih mengakses informasi ke pemilu. Karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi preferensi dalam menentukan pilihannya (Dettman & Pepinsky, 2023).

**Kata kunci** : Kepublikan ,Pemilu, Pemilih Muda

### Abstract

The 2024 election shows a shift in voter demographics, where voters who fall into the category of young voters quantitatively reach 56.45% of all DPT determined by the General Election Commission (KPU). This figure raises concerns because youth tend to be defined as participatory symbols rather than as agents of change who need to be encouraged as political subjects. A Center for Strategic and International Studies survey (2022) shows that around 59% of young people rely on social media as the main source of election information, even

though social media often fails to provide valid information regarding candidates' track records (Fernandes et al., 2023). However, the KPU's social media, which should be a valid source, tends to play a role in publishing daily coverage and more technical information in the election. The KPU as an independent public institution needs to be more public by publishing more substantial information rather than information that tends to be bureaucratic. Therefore, the KPU needs to change the paradigm and treat youth as political subjects who can think critically, one way is to openly provide profile information and track records of election participants and encourage election participants to seriously publicize their attention to issues of public concern. The KPU also needs to consider voter segmentation among the youth generation, such as the rational young voter segment, young voters who like light and simple politics by surfing social media, and young voters who are ideologically affiliated with youth organizations, especially in designing the content of publications that will be public space and the public sphere of young people in adopting valid information, as well as encouraging the younger generation to engage in Smart Digital Activism. The 2024 election landscape needs to be looked at seriously, as in research by Dettman & Pepinsky (2022), showing that there is a link between demographics and voting behavior in elections, including how voters access electoral information. Demographic characteristics such as age, gender, and education level can influence preferences in determining choices (Dettman & Pepinsky, 2023).

**Keywords:** Publicity, Elections, Young Voters

## PENDAHULUAN

Pada 14 Februari 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang juga beragam secara demografis, dimana calon pemilih yang berusia muda (17-39 tahun) lebih dominan secara kuantitatif. Sehingga preferensi dalam mengakses Informasi tentang kandidat peserta pemilu yang dipilih juga akan berbeda dengan generasi yang lebih tua. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 204.807.222 pemilih dimana sebanyak 66.822.389 jiwa adalah generasi milenial (33,6%) dan 46.800.161 jiwa adalah generasi Z (22,85%) Besarnya porsi hak pilih dari pemilih muda (17-39 tahun) akan sangat berperan dalam menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemilih muda akan didefinisikan sebagai angka partisipatif semata (token) atau berperan sebagai subjek atau agen perubahan? Pemilih muda yang dikategorikan sebagai generasi Z dan Milenial identik dengan generasi yang melek teknologi informasi. Survei CSIS (2022), menginformasikan bahwa 93,5% anak muda terhubung dengan internet.

Kemudian sebesar 84,8% dari generasi muda terhubung atau memiliki akun facebook, 74,9% terhubung dengan YouTube, 74,5% terhubung dengan Instagram dan ada 56,0% terhubung dengan tiktok serta 24,8% terhubung dengan X (dulunya twitter). Survei di atas semakin diperkuat dengan hasil Survei Internet 2023 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa 215.626.156 penduduk Indonesia terhubung dengan internet dengan tingkat penetrasi 78,19%. Survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas anak mudah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan penetrasi internet pada tahun 2023, yaitu 44,24% pada usia 13-34 tahun dan mayoritas pengguna internet menyampaikan bahwa alasan mereka harus berselancar di internet yaitu karena untuk mengakses media social seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube, Line, dsb) (APJII, 2023). Mayoritas responden memberikan penilaian 3.33 dari rentang skor 1-4 (semakin tinggi skor menunjukkan semakin pentingnya menggunakan media sosial). Hasil tersebut serupa dengan survei internet 2022 yang juga memposisikan media social sebagai alasan utama menggunakan internet dengan nilai 3.35 atau 98,02% (APJII, 2023). Pertanyaannya adalah bentuk informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh anak muda?.

Terpotret bahwa mayoritas pemilih muda mendambakan pemimpin yang jujur atau anti korupsi dengan angka 34,8%, disusul dengan harapan akan pemimpin yang berpengalaman sebesar 16,8%, pemimpin merakyat 15,9%, pemimpin tegas atau berwibawa 12,4% dan pemimpin inovatif atau bekerja baik sebesar 11,6%. Adapun isu-isu yang menarik minat kaum muda saat ini terfokus pada isu mengenai kesejahteraan masyarakat (44,4%), lapangan kerja

(21,3%), dan pemberantasan korupsi menjadi isu yang paling diminati, yang kemudian disusul oleh isu mengenai demokrasi, kesehatan dan lingkungan hidup (CSIS, 2022). Pertanyaan berikutnya ialah, bagaimana mereka bisa mengakses sumber informasi yang valid dan otoritatif tentang karakter kepemimpinan dan isu yang menjadi minat pemilih muda di atas? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, kami menyelenggarakan Publicness Forum (PF) sebanyak 3 kali dengan melibatkan KPU, Bawaslu, Bijak Memilih, Perludem, Akademisi dan Perwakilan Pemilih Muda yang kritis. Media Sosial Televisi Berita Online Lainnya Media Sosial 59% Televisi 32% Berita Online 6.3% Berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan Publicness Forum, kebutuhan generasi muda pada Informasi rekam jejak dan isu yang menjadi perhatian para peserta pemilu, secara kongkrit dapat mengacu pada Website dari Bijak Memilih (kanal informasi pemilu yang digagas komunitas anak muda), dimana mereka secara langsung mengagregasi banjir informasi tentang peserta pemilu dengan menyajikan informasi yang mudah dimengerti, relevan dan akurat untuk membantu pemilih muda mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai peserta pemilu. Intervensi dan agregasi informasi dilakukan melalui website yang mendorong pemilih untuk membaca dan Memahami konten isu-isu strategis yang relevan dengan atensi calon pemilih, menyediakan profil atau rekam jejak partai politik secara lengkap, dan menyediakan informasi tentang rekam jejak dan program kerja dari capres dan cawapres. Kemudian isi konten website tersebut di promosikan melalui berbagai media sosial bijak memilih untuk menarik minat para pemilih muda. Pemilih muda yang rasional, cenderung akan berfikir Sebagaimana konsep Berfikir Bijak Memilih dalam menyampaikan alur informasi bagi pemilih muda. Namun, ada juga pemilih muda yang menurut Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP (akademisi), merupakan kelompok anak muda yang lebih menyukai konten politik ringan dari pada materi kampanye yang konvensional dimana terkesan berat dan memaksa anak muda membaca dan mendengar lebih ekstra. Hal inilah yang menyebabkan narasi-narasi politik santai yang lebih mudah viral daripada politik dengan narasi-narasi yang lebih berat. Ketiga, Adanya segmen Anak muda Yang terafiliasi secara ideologis melalui organisasi kepemudaan, seperti organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim Publicness Forum Penyelenggaraan Pemilu, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, segmen ketiga ini juga termasuk sebagai pemilih kritis dan cenderung lebih memiliki kesadaran politik karena memang memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu publik seperti politik, ekonomi, sosial dan keagamaan. Bedanya dengan segmen pertama, segmen ketiga ini lebih potensial pada preferensi politik yang sewarna dan segaris dengan ideologi seperti nasionalis, islam kanan, islam moderat dan pemikir islam. Ketiga segmen anak muda di atas bisa menjadi pertimbangan bagi KPU dalam menyediakan dan mempublikasikan konten pemilu 2024 seperti rekam jejak, visi misi, dan isu-isu persoalan publik seperti isu kesejahteraan masyarakat, korupsi, isu lapangan kerja, demokrasi dan lingkungan hidup, terutama dalam merancang public space serta public sphere yang tepat dan sesuai bagi anak muda yang berbeda-beda segmentasinya melalui media sosial yang berkorelasi secara substansial dengan konten website KPU

## **METODE**

Tulisan mengenai kepublikan pemilu ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana orang mengalami peristiwa. Meskipun ada banyak pendekatan untuk penelitian kualitatif, mereka cenderung fleksibel dan fokus pada mempertahankan makna yang kaya saat menafsirkan data (Gunawan, 2013). Pendekatan umum termasuk teori dasar, etnografi, penelitian tindakan, penelitian fenomenologi, dan penelitian naratif. Mereka memiliki beberapa kesamaan, tetapi menekankan tujuan dan perspektif yang berbeda (Semiawan, 2010). Peneliti kualitatif juga menganggap diri mereka sebagai "instrumen" dalam sains, sehingga semua kesimpulan, persepsi, dan cara disaring melalui lensa pribadinya. Untuk alasan ini, ketika menulis metode analisis kualitatif, penting untuk fokus pada strategi anda dan memberikan penjelasan rinci tentang pilihan yang Anda buat saat mengumpulkan dan

mengevaluasi data (Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dalam menyajikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang sedang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 15 ayat 1 huruf c pada UU No 27 Tahun 2022 sebenarnya sudah semakin memperjelas bahwa kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dapat mengecualikan hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) seperti hak meminta pengendali data (badan) untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi, menarik persetujuan pemrosesan data, dan menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi oleh pengendali data. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 15 dapat dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui publik bahwa pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pada Pasal 14 huruf c, mewajibkan KPU menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Jika merujuk pada beberapa UU tersebut, maka seharusnya KPU tidak perlu khawatir dan tidak membiarkan peserta pemilu tidak mengisi profil dan rekam jejaknya karena ada UU yang menjaminkannya, termasuk UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang juga menjamin bahwa KPU tidak bisa dianggap melanggar peraturan ketika harus mempublikasikan profil dan rekam jejak peserta pemilu. Rekomendasi ANAK MUDA SEBAGAI SUBJEK POLITIK KPU semestinya memberikan ruang informasi yang dapat membangun critical thinking melalui penyediaan informasi yang lengkap seperti profil (pendidikan, pengalaman kerja), rekam jejak (status hukum), dan gagasan yang akan diadvokasi dan diperjuangkan oleh seorang peserta pemilu melalui platform media sosial KPU demi kepentingan publik pada masa yang akan datang. Mewujudkan anak muda sebagai subjek politik juga dapat dilakukan dengan mendorong generasi muda terlibat sebagai bagian dari Smart Digital Activism untuk meningkatkan critical thinking terutama saat berdiskusi dalam public space dan public sphere. Tujuannya adalah untuk melawan praktik-praktik politik fitnah atau hoax, politik identitas, politik uang dan isu SARA di masyarakat, mendorong pemilu yang berintegritas, LUBER-JURDIL, dan meningkatkan partisipasi secara langsung dalam proses berjalannya pemilu. Smart Digital Activism tidak akan tercapai tanpa adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses, diintegrasikan dan dekat dengan generasi muda seperti media sosial Instagram, Tiktok dan X/Twitter.

### Partisipasi Publik Dan Kualitas Pemilu

Partisipasi publik penting dalam meningkatkan kualitas pemilu dengan melibatkan peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap KPU agar mengakomodir konten informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga konten informasi KPU dapat menjadi sumber rujukan utama publik dalam mengakses informasi kepelembagaan. Anggota KPU August Mellaz hadir secara daring menjadi narasumber pada Webinar Kebangsaan bertema "Memilih Pemimpin Ideal Untuk Masa Depan Bangsa, Hak Pilihku Harus Digunakan Sebaik-baiknya" yang digelar Forum Osis Nasional (FON), Jumat (23/06/2023). Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial (55%). Untuk itu, generasi muda penting tak hanya mengenali, mendalami, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah, tetapi juga membantu KPU dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.

FON juga diminta membantu KPU menyosialisasikan pentingnya Pemilu 2024. "FON harapannya bisa jadi simpul penting membantu KPU menyebarluaskan informasi mengapa Pemilu 2024 penting. Mengapa pemilu itu penting? karena masa depan kita menyongsong Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka akan diisi teman-teman yang mengikuti webinar [red: generasi muda]," ujar Mellaz. Menurut Mellaz, pentingnya generasi muda membantu KPU dalam momentum Pemilu dengan memiliki persepsi dan cara pandang yang sama bahwa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sarana mempersatukan bukan memecah belah. "Selepas pemilu siapapun yang menang, kalah, kita semua WNI akan

menjadi penanggung dan atas beban yang sama untuk tetap menjaga agar NKRI ini berdiri kokoh, ini pada akhirnya teman-teman muda," kata Mellaz.

Dengan perkembangan teknologi informasi, lanjut Mellaz, generasi muda juga diyakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi membantu KPU memfilter misinformasi, disinformasi, hoaks, ujaran kebencian. Lebih lanjut, Mellaz mendorong mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dengan mengunjungi laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id). Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata Mellaz, telah dilakukan tingkat Kabupaten/Kota pada 20-21 Juni 2023 dan akan direkap tingkat Provinsi pada 27-28 Juni 2023, dan 2-4 Juli 2023 akan direkap dan ditetapkan tingkat nasional.

### **Adaptasi Sifat Organisasi**

Pemilih muda adalah konstituen yang unik dan memiliki keuntungan memiliki akses yang lebih baik ke komunikasi massa dan media sosial daripada generasi yang lebih tua. Melansir Anti Corruption Learning Centre, disebutkan survey yang telah dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) proporsi pemilih muda rentang usia 17-39 tahun diprediksi mendekati 60 persen. Kategori pemilih muda yaitu kelompok pemilih generasi Z (17-23) dan generasi milenial (24-39). Dalam ranah Pemilu ada yang disebut pemilih pemula atau rookie. Kategori pemilih ini meliputi pemilih pemula, pemilih lepas, pemilih pindah status dari TNI, pemilih pindah status dari Polri, dan pemilih pindahan. Pemilih muda ini termasuk juga sebagai pemilih pemula atau rookie. Disebut rookie karena pemilih yang akan mencoblos pada 14 Februari 2024 baru berusia 17 tahun atau baru melaksanakan prosesi pemilu pertamanya

Sifat organisasi akan menentukan cara merespon dan melayani. Oleh sebab itu, KPU perlu beradaptasi dengan kebutuhan publik, khususnya dengan perkembangan isu di kalangan generasi muda saat ini. Upaya beradaptasi bisa dilakukan dengan mengurangi cara kerja yang terlalu birokratis utamanya dalam mewujudkan kepentingan publik pemilih muda. Mayoritas pemilih muda adalah mereka para generasi yang lahir di era digital. Pemilih muda sangat mahir menggunakan teknologi digital, mulai dari media sosial hingga gadget atau perangkat IT lainnya. Karena tren aktivitas lintas perangkat, informasi harian yang berlebihan bagi generasi ini membanjiri perangkat seluler. Pergeseran sumber informasi dari media arus utama ke media sosial harus menjadi perhatian bagi pemilih muda, karena banyak informasi yang muncul di timeline media sosial sebenarnya mengandung penipuan, misinformasi, dan disinformasi.

### **Adopsi Informasi Kepemiluan**

Mendorong KPU mewujudkan nilai kepublikan dalam penyelenggaraan pemilu dengan mengadopsi atau mereplikasi konten informasi yang tersaji dalam media sosial dan website Komunitas Bijak Memilih. KPU dapat menjadi lebih public dengan menampilkan informasi mengenai atensi/gagasan suatu calon, informasi partai politik, informasi rekam jejak suatu calon, dan gagasan dari pasangan Capres-Cawapres sebagaimana tercantum dalam media sosial dan website Bijak Memilih. Untuk memaksimalkan dampak media sosial, pemilih muda juga harus diberikan pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pelatihan literasi digital dan berpikir kritis sangat diperlukan. Jika kemampuan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis ini masih minim untuk para pemilih muda, maka resiko potensi golput akan lebih besar. Hal ini diperparah dengan banyak konten kreator yang membahas sisi gelap para politisi dan hal ini akan membuat para pemilih muda semakin hilang kepercayaan dengan para calon yang akan ada di Pemilu 2024.

Media sosial dianggap sebagai senjata yang efektif untuk menarik pemilih pemula sebagai platform untuk berdiskusi dengan publik. Media sosial ini pula yang akan menjadi tolak ukur para pemilih muda. Saat ini, para pemilih muda sudah semakin kritis. Dengan banyaknya strategi kampanye di media sosial, semakin banyak pula nilai dari tiap calon yang akan ia bandingkan dengan nilai yang ia yakini dengan diri sendiri. Pemilih yang belum berpengalaman juga bisa memberikan informasi yang baik dan benar kepada orang lain atau kepada masyarakat terkecilnya, seperti keluarga. Partisipasi aktif pemilih muda dapat

membantu membentuk kebijakan publik yang inklusif dan mewakili seluruh masyarakat. Karena pemilih yang tidak berpengalaman cenderung memiliki ide, cara pandang dan energi baru yang dapat meremajakan dunia politik dan lain-lain. Peran pemilih muda sangat dinantikan dalam pemilu 2024. Selama ada pemilih muda atau pemilih pemula yang peduli kejujuran dan antikorupsi, negara dan bangsa ini akan tetap eksis dan jaya.

### Konten Informasi Sesuai Segmen Pemuda

Pemilih muda yang tersegmentasi dalam berbagai interest seperti pemilih rasional dan kritis, pemilih yang senang dengan konten yang ringan dan sederhana, serta pemilu muda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan yang bersifat ideologis, membutuhkan pendekatan konten yang berbeda. KPU perlu menghadirkan konten informatif untuk berbagai segmen pemilih muda tersebut dengan rejuvenasi dan optimalisasi konten media sosial dan website KPU dengan mengedepankan substansi informasi yang dibutuhkan pemilu muda seperti profil, rekam jejak dan atensi peserta pemilu terhadap isu-isu yang menjadi persoalan publik. Hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang *Kompas* menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut. Survei menggunakan telepon dilakukan terhadap 3.224 responden berusia 17-40 tahun yang tersebar di 80 daerah pemilihan (dapil) pada 5 Januari-9 Februari 2022. Sampel diambil dengan metode pencuplikan acak. Dengan metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, sedangkan *margin of error* lebih kurang 1,79 persen. Manajer Riset dan Analitik Kompas Gramedia (KG) Media Bagas Adi P mengatakan, antusiasme kaum milenial dan generasi Z untuk mengikuti pemilu muncul di semua dapil. Dari 80 dapil yang dikelompokkan dalam enam wilayah, keinginan responden untuk mengikuti pemilu di atas 85 persen. Misalnya, di Bali Nusa 92 persen, Jawa 85 persen, Kalimantan 90 persen, Maluku Papua 90 persen, Sulawesi 91 persen, dan Sumatera 86 persen.

Survei juga merekam sosok pemimpin yang diinginkan kaum milenial dan generasi Z. Di level nasional, mereka menginginkan presiden dengan tiga karakter utama, yakni tegas (24,7 persen), memahami kondisi negara (22,3 persen), dan merakyat (19,1 persen). Selain itu juga aksi nyata (11,1 persen), adil (10,6 persen), jujur (7,2 persen), bijaksana (7,2 persen), bertanggung jawab (6,8 persen). Tak seperti kesamaan kecenderungan untuk mengikuti Pemilu 2024, survei tentang karakter presiden ideal ini mendapat tanggapan berbeda-beda di setiap wilayah. Contohnya di Jawa, mayoritas responden menginginkan pemimpin yang tegas (28 persen). Sementara di Kalimantan sebanyak 24 persen, Maluku Papua (29 persen), dan Sulawesi (24 persen), responden mengharapkan muncul presiden yang merakyat atau dekat dengan rakyat, bersedia berbaur, dan terjun langsung ke masyarakat. Adapun mayoritas responden di Sumatera (24 persen) menginginkan presiden yang memahami masalah negara. Sebagian besar responden juga menilai baik Presiden Joko Widodo. "Meski begitu, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan, yakni kurang tegas (6 persen) dan kinerja yang kurang baik (3 persen)," katanya. "Sementara di daerah, karakter utama kepala daerah yang diinginkan itu adalah merakyat (26 persen), jujur (24 persen), dan tegas (17 persen), agak berbeda dengan figur presiden ideal," ujar Bagas. Penghitungan suara Pemilu Presiden 2019 di aula Kedutaan Besar RI di Berlin, Jerman, Rabu (17/4/2019). Dari hasil survei terlihat pula sejumlah pemengaruh (*influencer*) yang diikuti kaum milenial dan generasi Z. Selain selebritas, seperti Karin Novilda atau Awkarin dan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh politik juga muncul sebagai pemengaruh generasi muda di tingkat nasional. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Chief Marketing Officer (CMO) KG Media Dian Gemiano mengatakan, hasil survei ini merupakan temuan awal yang masih akan terus didalami. Menurut rencana, survei secara lengkap akan dipublikasikan pada Oktober mendatang.

Riset memerlukan waktu panjang karena bertujuan mengetahui keinginan anak muda, tidak hanya yang tinggal di perkotaan, tetapi juga di perdesaan yang selama ini kerap luput

dari berbagai survei dan penelitian. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, hasil survei tersebut merupakan kabar baik. Sebab, partisipasi generasi muda dalam pemilu ke depan sangat penting dan strategis. Seperti diberitakan sebelumnya, generasi milenial akan mendominasi pemilih pada Pemilu 2024

## SIMPULAN

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum yang diklaim terbesar di dunia pada 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia, sebagian di antaranya adalah pemilih pemula. Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama. Dalam pemilu 2024 mendatang, generasi muda berusia usia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka akan menjadi pemilih pemula. Selain dinasti politik, potensi polarisasi, misinformasi dan disinformasi di media sosial masih menjadi isu utama menjelang pemilu 2024.

Di saat pemilih muda membutuhkan informasi tentang rekam jejak, visi-misi, dan perhatian peserta pemilu terhadap isu-isu publik yang strategis, KPU justru menampilkan konten media social yang cenderung bersifat normatif seperti laporan kegiatan harian KPU. Selain itu, ketika pemilih muda menginginkan informasi sosok pemimpin yang jujur atau anti korupsi, berpengalaman, merakyat, tegas atau berwibawa, dan inovatif atau bekerja baik, KPU hanya menampilkan konten media social kelembagaan, Konten yang berisi isu-isu penting dan strategis, serta rekam jejak peserta pemilu justru diisi oleh bijak memilih yang menyediakan informasi untuk menstimulasi anak muda menjadi pemilih yang kritis dan rasional, Permasalahan lain muncul disaat pemilih muda dan konstituen menuntut keterbukaan informasi, namun KPU justru tidak konsisten dalam menyediakan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa KPU membiarkan peserta pemilu, khususnya caleg, untuk tidak mempublikasikan profil dan rekam jejak mereka seperti curriculum vitae dan riwayat pekerjaan, bahkan terdapat satu partai politik yang secara spesifik tidak berkenan mempublikasikan semua profil dan rekam jejak caleg yang mereka usung. Selain itu, ada juga caleg partai politik yang hanya berkenan mengisi sebagian. Kasus yang sama juga terjadi pada laman DCT calon perwakilan daerah. Dari website KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (DPR dan DPD), per 29 Desember 2023 ditemukan bahwa pada Dapil Aceh dari 30 calon DPD, terdapat 5 calon yang tidak berkenan profil ditampilkan. Selanjutnya pada calon DPD DIY, dari 9 calon terdapat 4 calon yang tidak bersedia membuka profil. Kemudian pada Calon Legislatif PDIP di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, isian mengenai riwayat pekerjaan, organisasi, pendidikan, kursus, dan diklat masih kosong semua.

Bahkan untuk Partai Golkar, semua Calon Legislatifnya tidak bersedia membuka data pribadi mereka (hasil penelusuran secara acak dari laman website KPU). KPU sebagai badan publik, sebagaimana terdefinisi dalam pasal 1 poin 3 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan kewajiban KPU sebagai badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala sebagaimana tercantum dalam pasal 9, seharusnya memberikan informasi profil seperti pengalaman organisasi, pengalaman kerja, riwayat pendidikan formal dan nonformal, dan rekam jejak seperti status hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak lagi bersifat pribadi dan bukan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 huruf h dan pasal 18 poin 1 huruf a UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi peserta pemilu sebagaimana diuraikan di atas, juga tidak bertentangan dengan UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), karena perlindungan data pribadi merujuk pada perlindungan data supaya tidak disalahgunakan seperti nomor NIK dan KK pada data kependudukan. UU PDP justru terkait dengan perlindungan Data Warga Negara Indonesia

yang dikumpulkan dalam sistem data DPT yang harus dijaga keamanannya oleh KPU sebagai pengendali data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. Apjii.or.Id. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Bijak Memilih (@bijakmemilihid). (2023). Closing statement debat pertama! Twitter.Com. <https://twitter.com/bijakmemilihid/status/1734596513236721702?s=20>
- Bijak Memilih (@bijakmemilihid). (2023b). WEBSITE TOUR PHASE 3 BIJAK MEMILIH CAPRES!!! Twitter.Com. [https://twitter.com/bijakmemilihid?s=11&t=arI5IXJd\\_gj4k25upmNyg](https://twitter.com/bijakmemilihid?s=11&t=arI5IXJd_gj4k25upmNyg)
- Dettman, S., & Pepinsky, T. B. (2023). Demographic Structure And Voting Behaviour During Democratization: Evidence from Malaysia's 2022 election. Democratization. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2254707>
- Fernandes, A., Suryahudaya, E. G., & Okhtariza, N. (2023). Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis , Adaptif dan Responsif. In Centre strategic and international studies (CSIS). Centre strategic and international studies (CSIS).
- Firmanzah. (2008). Antara Pemahaman Dan Realitas. Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas.Com. (2023). Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Prabowo dan Anies Alami Penurunan. Kompas.Com.<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/06200771/survei-litbang-kompas-elektabilitas-prabowo-meningkat-ganjar-dan-anies-alami?page=all>
- KPU RI. (2023). DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- KPU RI (@KPU\_ID). (2023). #TemamPemilih, Anggota KPU August Mellazmenerima Audiensi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), di Media Center KPU. Twitter.Com. [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1737022079034429492?s=20](https://twitter.com/KPU_ID/status/1737022079034429492?s=20) modo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.